

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.V. Dicey. 2008. Introduction to the Study Of the Law of the Constitution (terj). Nusamedia. Bandung.
- Achmad Ali. 2008. Menguak Tabir Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ahmad Mujahidin. 2006. Peradilan Satu Atap di Indonesia. Rafika Aditama. Bandung.
- Ahmad Sukardja. 2012. Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi M. Asrun. 2004. *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*. Elsam. Jakarta.
- Arief Sidharta. 2000. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Bagir Manan. 1995. Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. LPPM Universitas Islam Bandung. Bandung.
- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. UII Press. Yogyakarta.
- Brian J. Arnold. 2004. *Comparative Income Taxation: A Structure Analysis*. Kluwer Law International. New York City.
- CSA Teddy Lesmana. 2020. Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Pena Persada. Banyumas.
- Danang Wijayanto, et al. 2018. Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta.
- Darmoko Yuti Witantio dan Arya Putra Negara Kutawringin. 2013. *Sebuah instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Alfabeta. Bandung.
- E. Utrecht. 1989. Pengantar Hukum Administrasi Negara. PT Ichtisar Baru. Jakarta.
- Edie Toet Hendratno. 2009. Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme. Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Franz Magnis Suseno. 2003. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Galang Asmara. 2006. *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- I Gusti Bagus Suryawan. 2010. *Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum*. Publik Global Media. Yogyakarta.
- Ismail Rumadan. 2011. *Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Jakarta.
- Jamal Wiwoho. 2008. *Membangun Model Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Berkeadilan*. UNS Press. Surakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- , 2005. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- , 2005. *Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945*. FH UII Press. Yogyakarta.
- , 2010. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kusnardi Muh dan Bintan R. Saragih. 1983. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Kusnardi Muh. Dan Ibrahim Harmaily. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI. Jakarta.
- Lawrence M. Friedman. 2001. *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*. Alih Bahasa: Wisnu Basuki. Tatanusa. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mahfud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media. Yogyakarta.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Mahkamah Agung RI. Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022. *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2021*. Mahkamah Agung RI. Jakarta.
- Marbun BN. 2005. Kamus Hukum Indonesia. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Miriam Budiarto. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi. 2007. Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Muladi. 2002. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Cetakan Kedua. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Mulyadi Golap. 2019. Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta.
- Nasir Djamil. 2018 M. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta.
- Ni'matul Huda dan Imam Nasef. 2017. Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi. Kencana. Jakarta.
- Philippus M. Hadjon. 1989. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu. Surabaya.
- Pinpin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy. 1998. Pengantar Ilmu Hukum. Pustaka Setia. Bandung.
- Ridwan HR. 2018. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers. Jakarta.
- Rochmat Soemitro. 1991. *Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Eresco. Bandung.
- Salle. 2018. Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. CV. Social Politic Genius. Makassar.
- Satjipto Rahardjo. 2006. Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia. Kompas. Jakarta.
- Sjachran Basah. 1989. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Alumni. Bandung.

- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sri Y. Pudyatmoko. 2009. *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- , 2012. *Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*. Gramedia. Jakarta.
- Syofrin dan Asyhar Hidayat. 2004. *Hukum Pajak dan Permasalahannya*. Refika Aditama. Bandung.
- Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Yudhi Setiawan. 2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*. Rajawali Pers. Depok.

## **JURNAL**

- Achmad Edi Subiyanto. 2012. *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*. *Jurnal Konstitusi* Volume 9 Nomor 4.
- Achmad Irwan Hamzani. 2014. *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. *Jurnal Yustisia* Volume 3 Nomor 3.
- Afdol dan Sylvia Setjoatmadja. 2015. *Kedudukan, Eksistensi Dan Independensi Pengadilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 1 Nomor 1.
- Azward Rachmat Hambali. 2021. *Kemerdekaan Hakim dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konsep Negara Hukum*. *Kalabbirang Law Journal* Volume 3 Nomor 1.
- Efi Yulistiyowati, *et al.* 2016. *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Volume 18 Nomor 2.

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2010. Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum Menurut UU No. Tahun 2004. Jurnal Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 1.
- Harold See. 1998. Comment: Judicial Selection and Decisional Independence. Law and Contemporary Problems Summer .Volume 61 Nomor 3.
- Ismail Rumadan. 2014. Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System). Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 3 Nomor 3.
- Lutfil Ansori. 2017. Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Yuridis Volume 4 Nomor 2.
- Mulyani Zulaeha. 2011. Perkembangan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 1.
- Reni Ratna Anggreini. 2021. Relasi Mahkamah Agung Dan Pengadilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman, Lex Renaisan Nomor 3 Volume 6.
- Rika Marlina. 2018. Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 1.
- Sudikno Mertokusumo. 1997. Sistem Peradilan di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Volume 6 Nomor 9.
- Sunarto. 2016. Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Volume 45 Nomor 2.
- Wahyudi Djafar. 2010. Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia. Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 5.

#### **DISERTASI/TESIS**

- Hamid. S Attamimi. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun

Waktu Pelita I-Pelita IV. Disertasi Doktoral. Universitas Indonesia. Jakarta.

Sartono. 2015. Kemandirian dan Kebebasan Hakim Pengadilan Pajak Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Pajak Sebagai Bentuk Penegakan Hukum. Disertasi Doktoral. Universitas Jayabaya. Jakarta.

### **MAJALAH**

Viktor P. Pane. Pengadilan Pajak di Bawah Dua Atap. Majalah Mahkamah Agung. Edisi XXVII. Mahkamah Agung. 2021.

### **MAKALAH**

Andi Hamzah. Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Denpasar. 14-18 Juli 2003

Paulus E. Lotulung. Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum. Makalah disampaikan pada seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Denpasar. 14-18 Juli 2003.

### **MEDIA ONLINE**

Aida Mardatillah. 2020. Hakim Ini Minta Pembinaan Pengadilan Pajak Monopoli Mahkamah Agung. Jakarta. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-ini-minta-pembinaan-pengadilan-pajak-monopoli-ma-1t5f45370434f3c?page=1>. Diakses pada pukul 00.45 tanggal 4 Juni 2022.

Jimly Asshiddiqie. Penegakan Hukum. [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses pada 24 Juli 2022 Pukul 00.20 Wita.

Nisa Istiani. 2008. Menelaah Keberadaan Pengadilan Pajak. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. <http://www.pemantauperadilan.com/detil>. Diakses pada Pukul 17.40 Tanggal 4 Oktober 2022.